

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM MENJAMIN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA COVID-19
DI KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA**

Oliver David Apouw
NPP 28.1186

*Asdaf Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Keuangan Daerah*

E-mail: tuama.apouw@gmail.com

Abstract

Developments in the current era of globalization have an impact on every aspect of government, especially in the field of information technology used by the government to facilitate the implementation of services carried out to minimize existing problems. One of the problems with regional government that has always been an obstacle in making reports on the implementation of regional government is Regional Financial Management. Moreover, in the midst of the current Covid-19 pandemic, the activities and performance of local governments are slightly disrupted and hampered. This research is to find out and analyze the implementation of the Regional Management Information System in ensuring the Accountability of Regional Financial Management in Tomohon City during the Covid-19 pandemic which is based on Law Number 23 of 2014 Article 293 and Article 330 concerning Regional Government giving the mandate to regulate the Regional Financial Management.

Data collection techniques were carried out by in-depth interviews and documentation with leaders and employees of the Tomohon City Regional Finance and Revenue Management Agency and the existing SKPD Finance Section. The results of the study show the problems that exist in the Tomohon City Government, especially the Regional Finance and Revenue Management Agency in managing regional finances in accordance with Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Principles of Regional Financial Management in Tomohon City, especially in the midst of the current Covid-19 pandemic. However, the overall implementation of SIMDA Finance has been running in accordance with Edward III's Theory in terms of several existing indicators

Keywords: Implementation of Information Systems, Regional Management Information Systems, Financial Management Accountability

Abstrak

Perkembangan di era globalisasi saat ini memberikan dampak pada setiap aspek pemerintahan khususnya bidang teknologi informasi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan yang dilakukan untuk meminimalisasikan permasalahan yang ada. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan

pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini membuat aktivitas dan kinerja pemerintah daerah sedikit terganggu dan terhambat. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tomohon di masa pandemi Covid-19 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 293 dan Pasal 330 tentang Pemerintahan Daerah memberi Amanat Untuk Mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi dengan pimpinan dan pegawai dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon serta Bagian Keuangan SKPD yang ada. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang ada pada pemerintahan Daerah Kota Tomohon khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mengelola keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Tomohon terlebih ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Namun secara keseluruhan Implementasi SIMDA Keuangan ini sudah berjalan sesuai dengan Teori Edward III ditinjau dari beberapa indikator yang ada

Kata Kunci: *Implementasi, Sistem, Akuntabilitas, Informasi, Manajemen, Pengelolaan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi yang terjadi pada tahun 1998, sistem pemerintahan negara Indonesia mengalami perubahan yang fundamental, yakni dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Lahirnya reformasi ini kemudian ditandai dengan lahirnya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang berdasarkan kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.

Perubahan sistem pemerintahan tersebut memberikan efek yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Menurut Suwanda (2013) Otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Sesuai dengan tuntutan Bangsa Indonesia saat ini yang diharuskan dengan cepat dapat bersama-sama dengan paradigma otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih ditekankan untuk pertanggungjawaban dan lebih terbuka. Pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemanfaatan teknologi informasi salah satu bentuknya adalah direalisasikan dalam bentuk sistem informasi yang terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

Pemerintah Kota Tomohon merupakan salah satu pemerintahan yang menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan melalui komputer sejak 2012 dalam pengelolaan keuangan diseluruh OPD demi terwujudnya peningkatan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan. Secara Umum, penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) di sudah berjalan baik ditandai dengan prestasi yang ditorehkan dalam kurun waktu 7 tahun berturut-turut yaitu tahun 2014-2019 dapat mempertahankan Opini WTP yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atas Pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, sejak digunakannya SIMDA Keuangan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Letak kantor yang mempengaruhi kualitas jaringan internet sehingga menghambat proses transfer data keuangan yang dilakukan, serta kualitas SDM yang kurang yang menghambat proses refocussing dan realokasi anggaran di BPKPD kota Tomohon. sehingga faktor tersebut yang menghambat proses transfer data keuangan pada sistem informasi manajemen keuangan daerah yang ada di kota Tomohon.

Situs BPKP menjelaskan bahwa SIMDA merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim aplikasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan Aplikasi SIMDA, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi pelaporannya.

Program Aplikasi SIMDA yang dibentuk BPKP ini terdiri atas Program Aplikasi SIMDA Keuangan, Program Aplikasi Barang Milik Daerah (BMD), Aplikasi Komputer SIMDA Gaji, dan Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan, Aplikasi SIMDA Perencanaan.

Program Aplikasi Komputer SIMDA Keuangan adalah aplikasi yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Melalui situs <http://www.bpkp.go.id> dijelaskan bahwa output yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD).
2. Penatausahaan
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Surat Tanda Setoran (STS);
 - e. Register-register; dan
 - f. Formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Jurnal;
 - b. Buku Besar;
 - c. Buku Pembantu;
 - d. Laporan Keuangan
 - e. Perda Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

Tujuan dibentuknya aplikasi SIMDA (BPKP, 2008) yaitu :

- a. Sebagai tempat bertukar informasi bagi setiap unit kerja bersama penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- b. Sebagai salah satu media *control* bagi realisasi suatu program/kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dana;
- c. Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan *webcam* untuk unit kerja penerima koneksitas jaringan SIMDA;
- d. Sebagai media awal dan sarana untuk pelaksanaan *Good Government*

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian Novia Citra Dewi berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Kota Pariaman* (Novia Citra Dewi 2018), menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMDA Keuangan yaitu belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (*summary flow chart*) yang memperlihatkan aliran kas data, lemahnya data *management system*, prosedur untuk melihat data secara *incidental* masih terlalu lama, tata ruang perkantoran masih kurang memadai, seringnya *human error*, seringnya aplikasi SIMDA Keuangan *expired*, dan seringnya jaringan *offline*. Penelitian M Soleh Pulungan berjudul *Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas*. Jurnal Bina Praja | Volume 6 M (Soleh Pulungan 2014), menemukan bahwa Kendala dalam implementasi SIMDA Keuangan dalam Jaringan dan kapasitas *bandwidth* yang terlalu kecil untuk jaringan tertentu sehingga koneksi antar SKPD dan Pemda tidak optimal. Hal ini mempengaruhi implementasi SIMDA Keuangan di Daerah Kutai Kartanegara. Penelitian Darea, D.W., & Elim, I berjudul Darea, D.W., & Elim, I., (2015). *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Menemukan bahwa Perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut : sebelum menggunakan SIMDA Membutukan banyak waktu dalam penyajian Laporan Keuangan, Sering terjadi kesalahan dalam perhitungan Laporan

Keuangan karena tidak memiliki program rumus-rumus yang baku sehingga memungkinkan terjadi keterlambatan jadwal dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban. Sedangkan sesudah penggunaan SIMDA Keuangan adalah sebagai berikut Memiliki kecepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan karena menggunakan program komputerisasi yang memiliki program yang bekerja secara otomatis, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam perhitungan Laporan Keuangan karena memiliki rumus-rumus yang telah diprogram secara otomatis. Penelitian Juddy Julian Pilat, Jullie J, Sondakh, Hendrik Manossoh, (2016) berjudul *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado*, menemukan bahwa Komunikasi aktif telah dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan penerapan SIMDA Keuangan. Adanya komitmen pimpinan selaku pembuat kebijakan untuk memahami maksud dan tujuan penerapan kebijakan serta didukung dengan pemahaman bersama dari semua implementor tentang SIMDA Keuangan. Sosialisasi sebelum penerapan dan komunikasi selama penerapan dengan semua implementor pada Pemerintah Kota Manado dan juga pendampingan dari Tim Pengawasan BPKP Perwakilan Propinsi SULUT menjadikan aplikasi SIMDA Keuangan mampu dijalankan secara optimal. Penelitian (Nugraha 2013), dengan judul *analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era covid-19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara menggunakan indikator yang berbeda dari

penelitian yang sebelumnya yakni menggunakan indikator efektivitas dari George H Bodnar (2000) yang menyatakan bahwa ukuran efektivitas yaitu Indikator Keamanan Data Berhubungan dengan kemampuan sistem informasi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem. Indikator Waktu Berhubungan dengan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan suatu sistem informasi dalam mengolah informasi menjadi sebuah laporan secara periodic maupun non periodik , untuk rentang waktu yang telah ditentukan. Indikator ketelitian Berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Indikator Variasi Laporan atau *Output* Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volmenya. Tingkat kemampuan sistem informasi dalam membuat laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai kebutuhan pengguna informasi. Indikator Relevansi Menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Hal ini menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di era covid-19 di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2014:7) Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Dalam metode ini proses dalam penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola sehingga disebut metode artistik, kemudian data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi pada saat dilakukan penelitian dilapangan sehingga disebut metode interpretive.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data penulis diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P (*person, place & paper*). *Person* yaitu narasumber yang dijadikan informan oleh penulis, *Place* yaitu tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, *Paper* dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan mengenai buku petunjuk teknis SIMDA, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Penulis melakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 247-252) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan negara. Laporan Keuangan yang berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintahan Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai perubahan anggaran dalam hal ini pelaksanaan *refocussing* dan

realokasi anggaran, posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sistem itu harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang sekarang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menjadikan dasar peraturan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada level pemerintah daerah.

Penggunaan SIMDA Keuangan di Kota Tomohon sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan sangat membantu dalam pengelolaan keuangan terkhusus di BPKPD Kota Tomohon telah memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh para pegawai dengan adanya SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi secara online di seluruh OPD di Kota Tomohon maka tidak perlu lagi perwakilan masing-masing OPD untuk perwakilannya untuk menyampaikan informasi keuangan yang telah disusun karena seluruh seluruh informasi keuangan hanya perlu di input ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan yang telah menyediakan struktur atau format yang ada dan telah diatur keseragamannya.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penggunaan SIMDA Keuangan di BPKPD Kota Tomohon belum berjalan sesuai teori Edward III dengan ditandai dengan indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari indikator komunikasi, penggunaan SIMDA Keuangan telah memenuhi pertimbangan perancangan sistem pengamanan data sehingga data yang akan diakses tanpa izin dan tanpa mengetahui password kode log in maka tidak dapat masuk sehingga tidak perlu dikhawatirkan data akan diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab. Dari indikator sumber daya, penggunaan SIMDA Keuangan di BPKPD Kota Tomohon telah sesuai dengan tujuannya yaitu membantu percepatan perhimpunan data dan pelaporan keuangannya dengan sistem yang telah terintegrasi dengan seluruh OPD di Kota Tomohon memberikan kemudahan dalam input data, pencarian data yang dibutuhkan, memproses data, menyajikan data, hingga mengirim dan menerima

informasi atau data sangat bisa dipercaya karena kemampuan SIMDA Keuangan dalam menjalankan perintah bisa dikatakan cepat. Sama halnya dengan penelitian (Nugraha 2013), dengan judul *analisis implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD (studi kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa: aplikasi SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah telah mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern sistem yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan berjalan dengan baik dan aplikasi SIMDA Keuangan telah menghasilkan informasi laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya dengan kualitas relevansi, akurasi dan ketepatan waktu yang lebih baik dari sebelumnya.

Penggunaan SIMDA Keuangan dari indikator disposisi, kesalahan dalam menginput data bukan menjadi masalah pada pengoperasian SIMDA Keuangan karena sejauh ini hal-hal tersebut masih bisa diatasi dan belum pernah terjadi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan biarpun ada kesalahan tetap masih bisa diperbaiki oleh operator tetapi tetap disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari indikator laporan, output dari SIMDA Keuangan ini tidak hanya lengkap sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010, namun juga memiliki kelebihan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan informasi keuangan daerah Kota Tomohon, SIMDA Keuangan di BPKPD Kota Tomohon juga menyediakan laporan keuangan dengan format yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing OPD. Dari indikator struktur birokrasi, SIMDA Keuangan membantu efisiensi dalam efisien waktu, dan juga efisien biaya karena dengan adanya SIMDA Keuangan maka seluruh OPD tidak perlu lagi mengirim perwakilan OPD untuk harus datang ke BPKPD untuk menyampaikan dan menghimpun informasi pelaporan keuangan karena SIMDA Keuangan sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan aturan yang berlaku sehingga seluruh seluruh prosedur keuangan daerah dapat dilakukan dengan hanya mengklik menu yang telah disediakan oleh aplikasi SIMDA Keuangan.

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian beserta pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon sudah berjalan secara efektif dan juga sesuai dengan kriteria terhadap peraturan perundang-undangan. SIMDA Keuangan di Kota Tomohon juga telah memenuhi indikator efektivitas sistem informasi yaitu keamanan data, waktu, ketelitian, variasi laporan atau output, dan Relevansi.
2. Faktor yang menghambat dalam efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon yaitu, masih perlunya perbaikan dan penambahan sarana untuk mendukung efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, masih dibutuhkannya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaksana/operator Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, dan masih adanya sebagian penggunaan dengan cara manual dalam efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, sudah terlihat bahwa BPKPD telah mengusahakan semaksimal mungkin dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah melakukan berbagai upaya yaitu melaksanakan bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan bagi setiap OPD. BPKPD juga telah menyediakan sarana pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan di setiap OPD, jadi dengan ini dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon telah mengusahakan agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dapat berjalan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang akan diberikan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu:

1. Perlunya peningkatan pada pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan cara memberi pendampingan langsung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Tomohon perlu menambah jadwal pelaksanaan bimbingan teknis agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada sebagai pendukung pelaksanaan SIMDA Keuangan.
3. Perlunya penambahan sarana pendukung serta perhatian khusus pada sarana yang telah ada seperti kecepatan jaringan agar memperlancar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Chr. Jimmy L. Gaol. 2013. *Redaksi Pelakanaan*. Jakarta Utara : Cv Putra
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Erwan Erbie. 2015. Jenis Sistem Informasi. Penelitian Mahasiswa Indonesia
- Halim, A dan Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Hutagalung, Edward M. 2008. *Analisis Manajemen Keuangan Negara dan Daerah serta Hubungannya*. Jakarta: Pappas Sinar Sinanti
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Obrien. 2013. Sistem Informasi di Indonesia. IPTEK Indonesia. Bandung
- Pontoh. 2009. Pengertian Daerah menurut tokoh masyarakat. Pegawai Daerah Manado
- R. E. Dickinso. 2009. *Pengertian Daerah Umum*; Penelitian Bersama UKSH Indonesia.
- Riduwan. 2011. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rustanto, Bambang. 2015. *Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi, 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahad. 2014. Teori Pelaksanaan. Jakarta : Buku perpustakaan Indonesia
- Westa. 2012. Macam teori Pelaksanaan , Bandung : Gramedia Indonesia

a. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tomohon

b. Lain-lain

<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp> diakses pada 3 Oktober 2020